

## **KONFLIK TANAH MASYARAKAT ADAT PAPUA DALAM FILM PESTA BABI PERSPEKTIF KEADILAN JHON BORDLEY RAWLS**

**Fajar Illahi<sup>1</sup>, Andri Umar Soleh<sup>2</sup>, Zulfan Taufik<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,

E-mail: [fajarillahi570@gmail.com](mailto:fajarillahi570@gmail.com)

### **Abstract**

This study examines the representation of indigenous Papuan land conflicts in the film *Pesta Babi* through the perspective of John Bordley Rawls' theory of justice. The research aims to reveal the forms of social injustice, the marginalization of indigenous communities, and the power relations represented in the film. This study employs a qualitative approach using library research and content analysis methods. Primary data were obtained from the film's scenes, dialogues, visual symbols, and narrative structure, while secondary data were derived from books, academic journals, and scholarly documents related to land conflicts, human rights, and Rawls' theory of justice. The findings indicate that *Pesta Babi* portrays land conflict as a humanitarian issue closely associated with the loss of cultural identity, the right to life, and the spiritual space of indigenous Papuan communities. From the perspective of justice as fairness, the study demonstrates that the state has not been able to provide distributive justice, protection of fundamental rights, and equal participation for indigenous peoples. Furthermore, the film functions as a medium of social criticism toward unequal power relations and inhumane development practices affecting indigenous Papuan communities.

**Keywords:** *Land Conflict, Indigenous Papuan Communities, Rawlsian Justice*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas representasi konflik tanah masyarakat adat Papua dalam film *Pesta Babi* melalui perspektif teori keadilan John Bordley Rawls. Penelitian bertujuan untuk mengungkap bentuk ketidakadilan sosial, marginalisasi masyarakat adat, serta relasi kekuasaan yang direpresentasikan dalam film. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan teknik analisis isi (content analysis). Data primer diperoleh dari adegan, dialog, simbol visual, dan narasi film, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan dokumen ilmiah terkait konflik tanah, hak asasi manusia, dan teori keadilan Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film *Pesta Babi* merepresentasikan konflik tanah sebagai persoalan kemanusiaan yang berkaitan dengan hilangnya identitas budaya, hak hidup, dan ruang spiritual masyarakat adat Papua. Perspektif justice as fairness menunjukkan bahwa negara belum mampu menghadirkan keadilan distributif, perlindungan hak dasar, dan partisipasi setara bagi masyarakat adat. Film ini juga menjadi media kritik sosial terhadap ketimpangan kekuasaan dan pembangunan yang tidak manusiawi terhadap masyarakat adat Papua.

**Kata Kunci:** Konflik Tanah, Masyarakat Adat Papua, Keadilan Rawls

## **1. PENDAHULUAN**

Konflik tanah masyarakat adat di Papua merupakan salah satu persoalan sosial dan kemanusiaan yang hingga kini terus menjadi perdebatan dalam ruang hukum, politik, dan hak asasi manusia di

Indonesia. Tanah bagi masyarakat adat Papua tidak hanya dimaknai sebagai alat produksi ekonomi, melainkan sebagai simbol identitas, ruang spiritual, sumber kehidupan, dan bagian integral dari eksistensi budaya mereka. Dalam struktur kehidupan masyarakat adat Papua, tanah memiliki hubungan sakral dengan leluhur sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai adat dan keberlangsungan komunitas. Oleh sebab itu, ketika tanah adat mengalami penguasaan, pengambilalihan, atau eksploitasi oleh pihak luar tanpa persetujuan masyarakat adat, maka konflik yang muncul bukan sekadar konflik agraria biasa, tetapi juga menyangkut krisis identitas, marginalisasi budaya, dan hilangnya hak-hak dasar masyarakat adat.<sup>1</sup>

Realitas konflik tanah di Papua semakin kompleks karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara masyarakat adat dengan negara maupun korporasi. Dalam berbagai kasus, pembangunan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam sering dijadikan legitimasi untuk mengambil alih wilayah adat tanpa melibatkan masyarakat lokal secara adil dan partisipatif. Akibatnya, masyarakat adat Papua kerap berada dalam posisi subordinat karena akses terhadap hukum, pendidikan, politik, dan ekonomi masih sangat terbatas. Situasi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang menyebabkan masyarakat adat menjadi kelompok yang rentan mengalami ketidakadilan sosial.<sup>2</sup>

Konflik tanah di Papua akhirnya tidak hanya menjadi persoalan hukum kepemilikan, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam menghadirkan keadilan distributif dan perlindungan hak masyarakat adat secara menyeluruh. Fenomena tersebut kemudian banyak direpresentasikan dalam karya seni dan film sebagai bentuk kritik sosial

---

<sup>1</sup> Moh Maulana et al., “Kedudukan Self-Determination Dalam Konteks Otonomi Dan Pengakuan Identitas Kultural Masyarakat Adat Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)* 3.1 (2025): 53-70.,” *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)* 3, no. 1 (2025): 53–70.

<sup>2</sup> Wentri Merdiani and Elli Ruslina, “Peran Hukum Dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Ekonomi Berbasis Keadilan: Role of Law in Enhancing Welfare through a Justice-Based Economy.” *Res Nullius Law Journal* 7.1 (2025): 63-72.,” *Res Nullius Law Journal* 7, no. 1 (2025): 63–72.

terhadap realitas ketidakadilan yang terjadi di Papua. Salah satu film yang mengangkat persoalan tersebut adalah Pesta Babi. Film ini tidak hanya menghadirkan konflik tanah sebagai latar cerita, tetapi juga memperlihatkan dinamika kekuasaan, penindasan sosial, serta perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidup mereka.<sup>3</sup>

Melalui simbol, dialog, dan konflik antartokoh, film ini menggambarkan bagaimana masyarakat adat Papua sering diposisikan sebagai kelompok pinggiran yang suaranya kurang didengar dalam proses pembangunan. Film tersebut menjadi media representasi sosial yang penting karena mampu menggambarkan realitas ketidakadilan secara lebih emosional, kritis, dan humanis dibandingkan dengan data statistik atau laporan formal semata. Dalam perspektif kajian budaya, film bukan hanya produk hiburan, tetapi juga media ideologi yang merepresentasikan realitas sosial tertentu.<sup>4</sup>

Film dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu sosial, termasuk persoalan konflik tanah dan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, analisis terhadap film Pesta Babi menjadi relevan untuk mengungkap bagaimana praktik ketidakadilan direpresentasikan melalui narasi visual dan bagaimana posisi masyarakat adat ditempatkan dalam relasi kekuasaan yang timpang. Kajian ini penting karena representasi dalam film sering kali mempengaruhi kesadaran publik terhadap suatu persoalan sosial, termasuk dalam membangun empati terhadap penderitaan masyarakat adat Papua.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> HIJRANA HIJRANA, "REPRESENTASI PEREMPUAN YANG MELAWAN DALAM NOVEL 'PEREMPUAN YANG MENANGIS KEPADA BULAN HITAM' KARYA DIAN PURNOMO (ANALISIS WACANA KRITIS SARA MILLS). Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023." (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).

<sup>4</sup> Fany Aqmarina Ghaisani, "Representasi Kritik Sosial Dalam Film Indonesia (Analisis Semiotika Kritik Sosial Dalam Film Slang Nggak Ada Matinya). Diss. Universitas Airlangga, 2020." (Universitas Airlangga, 2020).

<sup>5</sup> Gabriella Hemas Sabatini et al., "Representasi Stereotype Terhadap Suku Papua Korowai (Analisis Semiotika Tentang Representasi Stereotype Terhadap Suku Papua Korowai Dalam Film Lost In Papua). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013." (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif keadilan dari John Bordley Rawls yang dikenal melalui konsep *justice as fairness*. Rawls menegaskan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam struktur sosial masyarakat. Menurut Rawls, setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, dan ketimpangan sosial maupun ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Pemikiran ini relevan dengan kondisi masyarakat adat Papua yang selama ini berada dalam posisi termarginalkan akibat dominasi kekuasaan negara dan kapitalisme ekonomi.<sup>6</sup>

Dalam konteks konflik tanah, teori Rawls dapat digunakan untuk melihat sejauh mana prinsip kesetaraan, kebebasan, dan distribusi keadilan telah diterapkan terhadap masyarakat adat Papua. Selain itu, teori keadilan Rawls juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok minoritas agar tidak menjadi korban dari kepentingan mayoritas. Dalam realitas konflik tanah di Papua, masyarakat adat sering kehilangan hak atas wilayah mereka atas nama pembangunan nasional dan investasi ekonomi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan distribusi kekuasaan yang menyebabkan masyarakat adat tidak memperoleh posisi tawar yang setara. Dengan demikian, pendekatan Rawls menjadi relevan untuk mengkritisi praktik-praktik ketidakadilan struktural yang direpresentasikan dalam film tersebut.<sup>7</sup>

Penelitian ini penting dilakukan karena tidak hanya membahas konflik tanah sebagai persoalan hukum agraria, tetapi juga menghubungkannya dengan dimensi filsafat keadilan, hak asasi manusia,

---

<sup>6</sup> LIMY MOKODOMPIT, "DINAMIKA INDUSTRIALISASI: TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT ADAT PAPUA (STUDI KASUS: SUKU KAMORO MIMIKA, PROVINSI PAPUA)= Industrialization Dynamics: Leadership Transformation In Papua Indigenous Society (Case Study: Kamoro Mimika Tribe, Papua Pr)" (Universitas Hasanuddin, 2024).

<sup>7</sup> I NYOMAN AGUS PRABAWA, "REKONSTRUKSI PENGATURAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI DI BALI BERBASIS KEADILAN. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025." (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

dan representasi media. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi filsafat sosial, hukum HAM, dan kajian film, khususnya terkait perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi refleksi kritis bagi pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat adat Papua agar pembangunan tidak lagi melahirkan marginalisasi dan konflik sosial yang berkepanjangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan berbagai persoalan ketidakadilan yang dialami masyarakat adat Papua dalam konflik tanah serta representasinya dalam film *Pesta Babi*, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena mampu mengungkap bentuk-bentuk ketimpangan sosial, marginalisasi masyarakat adat, dan praktik kekuasaan yang memengaruhi hak atas tanah adat. Selain itu, penelitian ini juga penting sebagai upaya akademik untuk menganalisis persoalan konflik tanah melalui perspektif keadilan John Bordley Rawls sehingga dapat memberikan pemahaman kritis mengenai pentingnya keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat adat, serta relevansi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam kajian filsafat keadilan dan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi refleksi ilmiah terhadap realitas sosial masyarakat Papua yang masih menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan struktural.<sup>9</sup>

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis isi

---

<sup>8</sup> Dyah Irawati and Hinijati Widjaja, *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani Di Sentani, Kabupaten Jayapura)*. Uki Press, 2006. (Uki Press, 2006).

<sup>9</sup> Heri Sulaiman, Ramzi Durin, and Desi Purnama, “‘Hak Atas Mendapatkan Kehidupan Yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima: Hak Atas Mendapatkan Kehidupan Yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima.’ *Dame Journal of Law* 1.1 (2025): 25-44.” *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025): 25-44.

(*content analysis*) terhadap film Pesta Babi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna konflik tanah masyarakat adat Papua yang direpresentasikan dalam film secara mendalam, kritis, dan kontekstual. Penelitian kualitatif tidak berorientasi pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman terhadap fenomena sosial, simbol, narasi, serta relasi kekuasaan yang muncul dalam objek penelitian.<sup>10</sup>

Dalam konteks ini, film dipahami sebagai media representasi sosial yang memuat pesan ideologis, kritik sosial, dan refleksi terhadap realitas masyarakat Papua terkait konflik tanah adat. Jenis penelitian kepustakaan digunakan karena sumber utama penelitian berasal dari dokumen, literatur ilmiah, teori filsafat, jurnal akademik, serta film yang menjadi objek kajian utama. Penelitian ini tidak melakukan observasi lapangan secara langsung, melainkan menelaah berbagai sumber tertulis dan visual yang berkaitan dengan konflik tanah masyarakat adat Papua serta teori keadilan John Bordley Rawls.<sup>11</sup>

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan film sebagai teks budaya yang dapat dianalisis melalui pendekatan filsafat sosial dan teori keadilan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah film Pesta Babi yang menjadi fokus utama analisis penelitian. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap adegan, dialog, alur cerita, simbol visual, karakter tokoh, serta konflik sosial yang ditampilkan dalam film tersebut. Sementara itu, sumber data

---

<sup>10</sup> Luh Sulasti Ningsih, I Ketut Putu Suardana, and Rieka Yulita Widawara, “REPRESENTASI KRITIK TERHADAP KEKUASAAN DAN PERLAWANAN DIGITAL DALAM VIDIO TIKTOK “INDONESIA GELAP”.” *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 10.4 (2025): 783-803.” *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 10, no. 4 (2025): 783–803.

<sup>11</sup> Indah Sulastry, “Perempuan Pembela Ham Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Kritis Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Uu It. Diss. UNUSIA, 2022.” (UNUSIA, 2022).

sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang membahas konflik tanah masyarakat adat Papua, hak asasi manusia, teori keadilan, serta kajian film dan representasi sosial.<sup>12</sup>

Data sekunder juga digunakan untuk memperkuat analisis teoritis mengenai konsep *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Bordley Rawls. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menonton film *Pesta Babi* secara berulang untuk memahami keseluruhan narasi dan menemukan bagian-bagian yang merepresentasikan konflik tanah masyarakat adat Papua. Peneliti kemudian mencatat dialog, adegan, simbol, maupun ekspresi visual yang berkaitan dengan ketidakadilan sosial, marginalisasi masyarakat adat, dominasi kekuasaan, dan perjuangan mempertahankan hak atas tanah adat. Selanjutnya, studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi ilmiah yang relevan guna memperkuat kerangka teoritis penelitian, khususnya mengenai konsep keadilan sosial menurut John Bordley Rawls dan kajian konflik agraria masyarakat adat di Indonesia.<sup>13</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-interpretatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan makna-makna sosial yang terkandung dalam film. Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti melakukan reduksi data dengan memilih adegan, dialog, dan narasi yang berkaitan langsung dengan konflik tanah masyarakat adat Papua. Kedua, data yang telah dipilih dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti ketidakadilan sosial,

---

<sup>12</sup> Raden Ahmad Rosyiddin Brillyanto, "Aktivisme Digital Dalam Mempromosikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Studi Kasus Amnesty International Indonesia). BS Thesis. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021." (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2021).

<sup>13</sup> S H Syaiful Bahari, *Hak Menguasai Negara Dalam Politik Hukum Agraria Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025).

relasi kekuasaan, marginalisasi masyarakat adat, eksploitasi tanah adat, dan perjuangan hak masyarakat adat.<sup>14</sup>

Ketiga, peneliti melakukan interpretasi terhadap data dengan menggunakan perspektif teori keadilan Rawls untuk melihat bagaimana prinsip kesetaraan, kebebasan, dan distribusi keadilan direpresentasikan dalam film tersebut. Dalam proses analisis, teori *justice as fairness* dari John Bordley Rawls menjadi landasan utama untuk mengkaji bentuk-bentuk ketidakadilan struktural yang dialami masyarakat adat Papua. Peneliti menelaah bagaimana kelompok masyarakat adat ditempatkan dalam posisi sosial yang tidak setara, bagaimana distribusi kekuasaan mempengaruhi hak atas tanah adat, serta bagaimana praktik pembangunan dalam film cenderung mengabaikan hak-hak kelompok minoritas.<sup>15</sup>

Analisis ini juga bertujuan untuk mengungkap kritik sosial yang disampaikan film terhadap negara, korporasi, maupun struktur kekuasaan yang menyebabkan konflik tanah di Papua terus berlangsung. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari film dengan berbagai referensi akademik, jurnal ilmiah, dan teori yang relevan. Triangulasi dilakukan agar hasil analisis tidak hanya bersifat subjektif, tetapi memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, peneliti juga melakukan pembacaan kritis terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat Papua agar interpretasi terhadap film tidak terlepas dari realitas sosial yang sebenarnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Karlina Hesti and Nabila Faraha Azarine, “Perempuan Adat Papua Dalam Implementasi Otonomi Khusus: Ketidakadilan Struktural Dan Strategi Resistansi Terhadap Eksploitasi Lingkungan,” n.d.

<sup>15</sup> Putri Junita et al., “Ketimpangan Kekuasaan Dan Bias Hukum Dalam Sengketa Lahan Rempang: Analisis Teori Konflik Terhadap Relasi Pemerintah, Investor, Dan Masyarakat Adat,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 12. C (2025): 138–52.

<sup>16</sup> Amanda Putri Nahumury, “PEMAKNAAN PEREMPUAN PAPUA TERHADAP IDENTITAS BUDAYA YANG DITAMPILKAN DALAM FILM DOKUMENTER” NOKEN RAHIM KEDUA”. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023).

Melalui metode penelitian ini, peneliti berupaya menghasilkan analisis yang mendalam mengenai representasi konflik tanah masyarakat adat Papua dalam film *Pesta Babi* serta relevansinya dengan perspektif keadilan John Bordley Rawls. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian filsafat keadilan, hak asasi manusia, kajian film, dan studi masyarakat adat di Indonesia. Metode penelitian ini menunjukkan bahwa kajian terhadap konflik tanah masyarakat adat Papua tidak hanya dapat dipahami melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga melalui analisis budaya dan filsafat sosial.<sup>17</sup>

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis isi terhadap film *Pesta Babi*, penelitian ini mampu mengungkap makna-makna sosial yang tersembunyi di balik dialog, simbol visual, dan narasi film. Pendekatan tersebut memberikan ruang interpretasi yang lebih mendalam terhadap realitas ketidakadilan yang dialami masyarakat adat Papua dalam mempertahankan hak atas tanah adat mereka. Penggunaan teori keadilan John Bordley Rawls dalam penelitian ini juga menjadi landasan analitis yang penting untuk melihat bagaimana praktik ketimpangan sosial direpresentasikan dalam film.<sup>18</sup>

Konsep *justice as fairness* memberikan kerangka berpikir yang kritis dalam memahami persoalan distribusi kekuasaan, hak kebebasan, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Melalui teori tersebut, penelitian ini tidak hanya menafsirkan konflik tanah sebagai persoalan agraria, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang lahir akibat relasi kuasa yang timpang antara masyarakat adat, negara, dan kepentingan ekonomi. Selain itu, metode analisis isi yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai bentuk

---

<sup>17</sup> Yuldiana Zesa Azis and Emiliana B Rahail, “Kearifan Lokal Dalam Adaptasi Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Ekspansi Investasi: Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Di Merauke.” *Jurnal Restorative Justice* 9.2 (2025): 137-154.” *Jurnal Restorative Justice* 9, no. 2 (2025): 137–54.

<sup>18</sup> Mohamad Soleh Nurzaman, *Ekonomi Mikro Islam*. Penerbit Salemba, 2022. (Penerbit Salemba, 2022).

marginalisasi masyarakat adat Papua yang ditampilkan dalam film *Pesta Babi*. Representasi visual dan narasi dalam film memperlihatkan bagaimana masyarakat adat sering diposisikan sebagai kelompok yang lemah dan kurang memperoleh akses terhadap keadilan sosial.<sup>19</sup>

Dengan demikian, penelitian ini mempertegas bahwa film bukan hanya media hiburan, tetapi juga media kritik sosial yang memiliki kekuatan dalam membangun kesadaran publik terhadap persoalan kemanusiaan dan hak masyarakat adat. Melalui teknik triangulasi sumber dan studi literatur, penelitian ini berupaya menjaga validitas serta objektivitas analisis agar hasil penelitian memiliki dasar akademik yang kuat. Penggabungan antara data visual dari film dengan teori filsafat keadilan dan referensi ilmiah lainnya menjadikan penelitian ini lebih komprehensif dalam membaca realitas konflik tanah masyarakat adat Papua.<sup>20</sup>

Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa kajian film dapat menjadi sarana ilmiah untuk memahami persoalan sosial secara lebih reflektif dan kontekstual. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, kritis, dan relevan terhadap persoalan konflik tanah masyarakat adat Papua. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian filsafat keadilan dan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi refleksi akademik mengenai pentingnya menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat adat di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam memahami persoalan konflik tanah adat sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil, humanis, dan berpihak kepada masyarakat adat Papua.

---

<sup>19</sup> Barriman Hidayatullah and Didik Hariyanto, “‘Social Class Representation in the Film *Satria Dewa Gatotkaca*: Representasi Kelas Sosial Dalam Film *Satria Dewa Gatotkaca*.’ *House of Wisdom: Journal on Library and Information Sciences* 2.4 (2025): 10-21070.” *House of Wisdom: Journal on Library and Information Sciences* 2, no. 4 (2025): 10–21070.

<sup>20</sup> Fredrik Sokoy et al., *Antropologi Ekonomi Dan Pembangunan Papua Dalam Bayang-Bayang Provinsi Olahraga*. Penerbit: Kramantara JS, 2025. (Penerbit: Kramantara JS, 2025).

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1. Representasi Konflik Tanah Masyarakat Adat Papua dalam Film Pesta Babi**

Film Pesta Babi merepresentasikan konflik tanah masyarakat adat Papua sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, tetapi juga menyangkut identitas budaya, keberlangsungan hidup masyarakat adat, dan relasi kekuasaan yang timpang antara masyarakat lokal dengan pihak yang memiliki kekuatan politik maupun ekonomi. Dalam film tersebut, tanah digambarkan sebagai ruang hidup yang memiliki nilai spiritual dan historis bagi masyarakat adat Papua. Kehilangan tanah bukan sekadar kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga hilangnya hubungan sakral dengan leluhur serta runtuhnya identitas sosial masyarakat adat. Konflik yang ditampilkan dalam film memperlihatkan adanya dominasi kekuasaan dari pihak luar terhadap masyarakat adat Papua.<sup>21</sup>

Dominasi tersebut terlihat melalui penguasaan tanah atas nama pembangunan dan kepentingan ekonomi yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat secara adil. Dalam beberapa adegan, masyarakat adat digambarkan tidak memiliki posisi tawar yang kuat ketika berhadapan dengan kekuasaan negara maupun kelompok yang memiliki modal ekonomi. Situasi tersebut menunjukkan adanya marginalisasi struktural yang menyebabkan masyarakat adat Papua menjadi kelompok yang rentan mengalami ketidakadilan sosial. Film ini juga menampilkan bagaimana masyarakat adat Papua sering kali diposisikan sebagai kelompok pinggiran yang suaranya diabaikan dalam proses pembangunan. Narasi film

---

<sup>21</sup> Syafuan Rozi et al., *Politik Identitas: Problematika Dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali Dan Papua*. Bumi Aksara, 2021. (Bumi Aksara, 2021).

memperlihatkan bahwa pembangunan yang dilakukan atas nama kemajuan justru melahirkan penderitaan sosial bagi masyarakat adat.<sup>22</sup>

Konflik tanah dalam film akhirnya menjadi simbol kritik terhadap praktik pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keadilan sosial dan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, film *Pesta Babi* menggambarkan adanya ketimpangan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik memperoleh akses yang lebih besar terhadap tanah dan sumber daya alam, sedangkan masyarakat adat mengalami keterbatasan akses terhadap hukum dan perlindungan negara. Ketimpangan tersebut memperlihatkan bahwa konflik tanah di Papua bukan hanya persoalan agraria, tetapi juga bentuk ketidakadilan struktural yang berlangsung secara sistematis.<sup>23</sup>

Dalam perspektif kajian budaya, representasi konflik tanah dalam film ini menunjukkan bahwa media visual dapat menjadi sarana kritik sosial terhadap realitas ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium ideologi yang mampu membentuk kesadaran publik mengenai penderitaan masyarakat adat Papua. Dengan demikian, film ini menjadi bentuk refleksi sosial terhadap kondisi masyarakat Papua yang masih menghadapi berbagai bentuk marginalisasi dan diskriminasi dalam mempertahankan hak atas tanah adat mereka.<sup>24</sup>

### **3.2. Analisis Konflik Tanah dalam Perspektif Keadilan John Bordley Rawls**

---

<sup>22</sup> Arif Novianto, “Berebut Saminisme: Artikulasi Politik Masyarakat Adat Dalam Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Pegunungan Kendeng.’ Kebijakan Publik Dalam Pusaran Perubahan Ideologi Dari Kuasa Negara Ke Dominasi Pasar (2018): 228â.” *Kebijakan Publik Dalam Pusaran Perubahan Ideologi Dari Kuasa Negara Ke Dominasi Pasar*, 2018, 228â.

<sup>23</sup> Januar Rahadian Mahendra, “Kebijakan Pembangunan vs Hak Masyarakat Adat: Konflik Sumber Daya Dan Kekerasan Di Papua.’ *Proceedings National Conference Sinesia*. Vol. 1. No. 1. 2025.” in *Proceedings National Conference Sinesia*, vol. 1, 2025, 100–114.

<sup>24</sup> Mariani Mariani, Dadang Rahmat Hidayat, and Agus Rahmat, “Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.’ *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3.01 (2025).” *SAWERIGADING* 31, no. 2 (2025): 554–69.

Pemikiran John Bordley Rawls mengenai *justice as fairness* menjadi landasan utama dalam menganalisis konflik tanah masyarakat adat Papua dalam film Pesta Babi. Rawls menegaskan bahwa keadilan harus menjadi prinsip dasar dalam struktur sosial masyarakat. Menurut Rawls, setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar dan negara wajib menciptakan sistem sosial yang memberikan perlindungan terhadap kelompok yang paling lemah. Dalam konteks film, masyarakat adat Papua digambarkan sebagai kelompok minoritas yang tidak memperoleh akses keadilan secara setara. Mereka kehilangan hak atas tanah adat akibat dominasi kekuasaan negara dan kepentingan ekonomi. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan Rawls karena ketimpangan sosial yang terjadi tidak memberikan manfaat kepada kelompok yang paling kurang beruntung, melainkan justru memperkuat dominasi kelompok elit.<sup>25</sup>

Konsep *equal liberty principle* atau prinsip kebebasan yang sama dalam teori Rawls menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang tidak boleh dirampas oleh kepentingan mayoritas. Dalam film, hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidup mereka justru diabaikan demi kepentingan pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kebebasan dasar masyarakat adat Papua. Selain itu, teori Rawls juga menekankan *difference principle*, yaitu ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat kepada kelompok yang paling lemah. Namun, dalam konflik tanah yang direpresentasikan dalam film, pembangunan dan eksploitasi tanah justru memperburuk kondisi masyarakat adat. Mereka kehilangan akses terhadap

---

<sup>25</sup> Mariani, Hidayat, and Rahmat.

sumber kehidupan, mengalami marginalisasi sosial, dan tidak memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan tersebut.<sup>26</sup>

Film ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat adat Papua mengalami keterbatasan akses terhadap proses hukum dan pengambilan keputusan. Dalam perspektif Rawls, kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial yang ada belum menghadirkan keadilan distributif secara menyeluruh. Negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas agar tidak menjadi korban dari dominasi kekuasaan mayoritas maupun kepentingan kapitalisme ekonomi. Dengan demikian, melalui perspektif John Bordley Rawls, konflik tanah masyarakat adat Papua dalam film Pesta Babi dapat dipahami sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang lahir akibat distribusi kekuasaan yang tidak seimbang. Film ini menjadi kritik terhadap sistem sosial yang gagal menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat adat Papua.<sup>27</sup>

**Tabel Analisis Konflik Tanah Masyarakat Adat Papua dalam Film Pesta Babi Perspektif Keadilan John Bordley Rawls**

<b>No</b>	<b>Data dalam Film</b>	<b>Bentuk Konflik</b>	<b>Analisis Perspektif Rawls</b>	<b>Makna Sosial</b>
<b>1</b>	Pengambilalihan tanah adat tanpa persetujuan masyarakat	Hilangnya hak masyarakat adat atas tanah	Bertentangan dengan prinsip kebebasan dasar ( <i>equal liberty principle</i> ) karena hak masyarakat	Menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak masyarakat

<sup>26</sup> Hidayatus Sholichah et al., “Systematic Literature Review: Pemberdayaan Masyarakat Inklusif Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 11.1 (2025): 27-40.,” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 11, no. 1 (2025): 27–40.

<sup>27</sup> Astuti Nurlaila Kilwouw, “Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara (Kapitalisasi Sumberdaya Agraria Di Era Otonomi Daerah). Diss. Universitas Islam Indonesia, 2017.” (Universitas Islam Indonesia, 2017).

			adat diabaikan	adat
<b>2</b>	Dominasi pihak berkuasa dalam pengelolaan tanah	Ketimpangan distribusi kekuasaan	Tidak sesuai dengan konsep <i>justice as fairness</i> karena kelompok lemah tidak memperoleh keadilan	Masyarakat adat menjadi kelompok marginal
<b>3</b>	Masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pembangunan	Eksklusi sosial dan politik	Melanggar prinsip partisipasi setara dalam struktur sosial	Pembangunan bersifat elitis dan tidak humanis
<b>4.</b>	Kehilangan ruang hidup masyarakat adat	Krisis identitas budaya	Ketidakadilan distributif menyebabkan kelompok minoritas kehilangan hak hidup layak	Tanah memiliki nilai spiritual dan budaya
<b>5.</b>	Eksplorasi sumber daya alam di wilayah adat	Ketimpangan ekonomi	<i>Difference principle</i> tidak terpenuhi karena pembangunan tidak menguntungkan masyarakat adat	Kapitalisme ekonomi memperburuk ketimpangan sosial
<b>6.</b>	Ketidakmampuan masyarakat adat mengakses hukum	Ketidaksetaraan hukum	Negara gagal menciptakan sistem keadilan yang setara	Hukum cenderung berpihak pada kelompok

				berkuasa
7.	Perlawanan masyarakat adat mempertahankan tanah	Konflik sosial dan budaya	Bentuk perjuangan memperoleh hak dan keadilan sosial	Masyarakat adat mempertahankan identitas kolektif
8.	Simbol penderitaan masyarakat adat dalam film	Marginalisasi sosial	Ketidakadilan terjadi secara struktural dan sistematis	Film menjadi kritik sosial terhadap negara
9.	Pembangunan atas nama kemajuan	Konflik pembangunan	Pembangunan tidak memenuhi asas keadilan sosial Rawls	Modernisasi mengorbankan masyarakat adat
10.	Suara masyarakat adat diabaikan	Dominasi mayoritas	Kelompok minoritas tidak memperoleh posisi setara	Menunjukkan krisis demokrasi sosial

**3.3. Kritik Sosial Film terhadap Ketidakadilan Struktural dan Relevansi Teori Keadilan Rawls terhadap Konflik Tanah Papua**

Film Pesta Babi tidak hanya menggambarkan konflik tanah sebagai persoalan lokal masyarakat Papua, tetapi juga menghadirkan kritik terhadap sistem sosial dan politik yang melanggengkan ketidakadilan struktural. Film ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat Papua sering diposisikan sebagai objek pembangunan tanpa diberikan ruang partisipasi yang adil. Situasi tersebut memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang antara masyarakat adat dengan negara maupun korporasi. Dalam

perspektif teori keadilan John Bordley Rawls, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam menerapkan prinsip keadilan distributif.<sup>28</sup>

Negara seharusnya menjamin bahwa setiap kebijakan pembangunan memberikan manfaat kepada kelompok yang paling rentan. Akan tetapi, dalam realitas yang direpresentasikan film, pembangunan justru menjadi alat dominasi yang memperkuat ketimpangan sosial. Film ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat adat Papua mengalami alienasi sosial akibat hilangnya tanah adat mereka. Tanah yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya berubah menjadi objek ekonomi yang dikuasai oleh pihak luar. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat adat kehilangan identitas budaya dan mengalami keterasingan dalam ruang hidup mereka sendiri. Selain itu, kritik sosial dalam film terlihat melalui simbol-simbol visual yang menggambarkan penderitaan masyarakat adat.<sup>29</sup>

Representasi tersebut memperkuat pesan bahwa konflik tanah di Papua bukan sekadar konflik hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Film ini akhirnya menjadi media refleksi terhadap praktik pembangunan yang sering kali mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial. Pemikiran John Bordley Rawls sangat relevan digunakan dalam menganalisis konflik tanah masyarakat adat Papua karena teori tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok minoritas dan distribusi keadilan yang setara. Dalam konteks Papua, masyarakat adat merupakan kelompok yang rentan mengalami ketidakadilan akibat dominasi kekuasaan politik dan ekonomi. Konsep *justice as fairness*

---

<sup>28</sup> Heri Sulaiman et al., “‘John Rawls’ Theory of Justice and Its Relevance in the Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary Era: Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer.” *Al Hairy|*,” *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 25–36.

<sup>29</sup> Ranga Saptya Mohamad Permana, Elis Suryani Nani Sumarlina, and Undang Ahmad Darsa, “Kritik Sosial Dalam Film-Film Kabayan Di Era Orde Baru: Ketimpangan Desa-Kota, Perilaku Materialistis Dan Dampak Globalisasi.” *KABUYUTAN* 4.1 (2025): 68-78.,” *KABUYUTAN* 4, no. 1 (2025): 68–78.

memberikan pemahaman bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.<sup>30</sup>

Negara memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa masyarakat adat memperoleh hak yang setara dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Melalui perspektif Rawls, konflik tanah Papua dapat dipahami sebagai akibat dari kegagalan sistem sosial dalam menciptakan distribusi kekuasaan yang adil. Ketika kelompok minoritas tidak memiliki akses terhadap hukum, pendidikan, dan pengambilan keputusan, maka ketimpangan sosial akan terus berlangsung dan melahirkan konflik berkepanjangan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa film *Pesta Babi* berhasil merepresentasikan realitas ketidakadilan yang dialami masyarakat adat Papua sekaligus menjadi kritik terhadap struktur sosial yang tidak berpihak kepada kelompok marginal. Perspektif keadilan John Bordley Rawls memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami bahwa konflik tanah masyarakat adat Papua merupakan persoalan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan distribusi kekuasaan yang belum terselesaikan secara adil di Indonesia.<sup>31</sup>

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1. Kesimpulan**

penelitian ini menunjukkan bahwa film *Pesta Babi* berhasil merepresentasikan konflik tanah masyarakat adat Papua sebagai persoalan kemanusiaan, ketidakadilan sosial, dan marginalisasi struktural yang tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, tetapi juga menyangkut identitas budaya, hak hidup, serta keberlangsungan masyarakat adat.

---

<sup>30</sup> Ilham Solihin Laitupa, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke). Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024." (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

<sup>31</sup> Annisa Mayang Tyaningrum, Sudarsono Sudarsono, and Shinta Hadiyantina, "'Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Konflik Agraria Dan Keadilan Sosial.'" *Bacarita Law Journal* 5.2 (2025): 251-263., " *Bacarita Law Journal* 5, no. 2 (2025): 251-63.

Tanah dalam kehidupan masyarakat adat Papua memiliki nilai spiritual, historis, dan kultural yang sangat kuat sehingga kehilangan tanah berarti kehilangan hubungan dengan leluhur, ruang hidup, dan identitas kolektif mereka. Film ini memperlihatkan bahwa pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam sering dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat secara adil sehingga melahirkan ketimpangan sosial dan konflik berkepanjangan. Melalui pendekatan teori keadilan John Bordley Rawls, penelitian ini menemukan bahwa konflik tanah masyarakat adat Papua mencerminkan kegagalan negara dalam menerapkan prinsip justice as fairness. Prinsip kebebasan yang setara (equal liberty principle) tidak terpenuhi karena masyarakat adat kehilangan hak dasar atas tanah dan ruang hidup mereka. Selain itu, difference principle juga tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pembangunan dan eksploitasi ekonomi justru lebih menguntungkan kelompok yang memiliki kekuasaan politik dan modal dibandingkan masyarakat adat sebagai kelompok yang paling rentan. Ketimpangan distribusi kekuasaan, keterbatasan akses hukum, serta tidak adanya partisipasi setara dalam proses pembangunan menunjukkan adanya ketidakadilan distributif yang bersifat sistematis. Penelitian ini juga menegaskan bahwa film bukan hanya media hiburan, tetapi media kritik sosial yang mampu membangun kesadaran publik terhadap realitas penderitaan masyarakat adat Papua. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam kajian filsafat keadilan, hak asasi manusia, dan kajian film sekaligus menegaskan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih humanis, partisipatif, dan berpihak pada perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai representasi konflik tanah masyarakat adat Papua dalam film *Pesta Babi* perspektif keadilan John Bordley Rawls, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama,

pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih adil, humanis, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat Papua dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Negara perlu memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap hak tanah adat agar masyarakat adat tidak terus menjadi korban marginalisasi, eksploitasi ekonomi, dan ketimpangan kekuasaan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat implementasi hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial dalam setiap kebijakan pembangunan di Papua sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan budaya dan kehidupan masyarakat adat. Kedua, bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan kajian mengenai konflik tanah masyarakat adat, filsafat keadilan, hak asasi manusia, dan representasi media. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan kepustakaan, tetapi juga melakukan penelitian lapangan agar memperoleh data empiris yang lebih mendalam mengenai realitas konflik tanah masyarakat adat Papua. Selain itu, penggunaan teori sosial dan filsafat lainnya dapat memperkaya perspektif analisis terhadap persoalan ketidakadilan struktural di Indonesia. Ketiga, bagi masyarakat dan pelaku media, film seperti *Pesta Babi* perlu dijadikan sarana edukasi sosial untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan hak masyarakat adat. Media diharapkan mampu menghadirkan representasi yang lebih adil dan humanis terhadap masyarakat Papua sehingga dapat membangun empati sosial dan mengurangi diskriminasi terhadap kelompok marginal. Dengan demikian, keadilan sosial bagi masyarakat adat Papua tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial dan kebijakan negara secara nyata.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azis, Yuldiana Zesa, and Emiliana B Rahail. “Kearifan Lokal Dalam Adaptasi Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Ekspansi Investasi: Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Di Merauke.’ *Jurnal Restorative Justice* 9.2 (2025): 137-154.” *Jurnal Restorative Justice* 9, no. 2 (2025): 137–54.
- Brillyanto, Raden Ahmad Rosyiddin. “Aktivisme Digital Dalam Mempromosikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Studi Kasus Amnesty International Indonesia). BS Thesis. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2021.
- Ghaisani, Fany Aqmarina. “Representasi Kritik Sosial Dalam Film Indonesia (Analisis Semiotika Kritik Sosial Dalam Film Slank Nggak Ada Matinya). Diss. Universitas Airlangga, 2020.” Universitas Airlangga, 2020.
- Hesti, Karlina, and Nabila Faraha Azarine. “Perempuan Adat Papua Dalam Implementasi Otonomi Khusus: Ketidakadilan Struktural Dan Strategi Resistansi Terhadap Eksploitasi Lingkungan.,” n.d.
- Hidayatullah, Barriman, and Didik Hariyanto. “Social Class Representation in the Film Satria Dewa Gatotkaca: Representasi Kelas Sosial Dalam Film Satria Dewa Gatotkaca.’ *House of Wisdom: Journal on Library and Information Sciences* 2.4 (2025): 10-21070.” *House of Wisdom: Journal on Library and Information Sciences* 2, no. 4 (2025): 10–21070.
- HIJRANA, HIJRANA. “REPRESENTASI PEREMPUAN YANG MELAWAN DALAM NOVEL ‘PEREMPUAN YANG MENANGIS KEPADA BULAN HITAM’ KARYA DIAN PURNOMO (ANALISIS WACANA KRITIS SARA MILLS). Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Irawati, Dyah, and Hiniwati Widjaja. *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani Di Sentani, Kabupaten Jayapura)*. Uki Press, 2006. Uki Press, 2006.
- Junita, Putri, Cut Anastasya Nurul Hilal, Marsya Ainun Kholila, Deva Anasthalia, and Ubaidillah Kamal. “Ketimpangan Kekuasaan Dan Bias Hukum Dalam Sengketa Lahan Rempang: Analisis Teori Konflik Terhadap Relasi Pemerintah, Investor, Dan Masyarakat Adat.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 12. C (2025): 138–52.
- Kilwouw, Astuti Nurlaila. “Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara (Kapitalisasi Sumberdaya Agraria Di Era

Otonomi Daerah). Diss. Universitas Islam Indonesia, 2017.” Universitas Islam Indonesia, 2017.

Laitupa, Ilham Solihin. “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke). Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Mahendra, Januar Rahadian. “Kebijakan Pembangunan vs Hak Masyarakat Adat: Konflik Sumber Daya Dan Kekerasan Di Papua.’ Proceedings National Conference Sinesia. Vol. 1. No. 1. 2025.” In *Proceedings National Conference Sinesia*, 1:100–114, 2025.

Mariani, Mariani, Dadang Rahmat Hidayat, and Agus Rahmat. “Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.’ Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora 3.01 (2025).” *SAWERIGADING* 31, no. 2 (2025): 554–69.

Maulana, Moh, Silvoni Kakoe, Suryani Intan Puwa, Anastasia Sarjono, and Sofyan Piyo. “Kedudukan Self-Determination Dalam Konteks Otonomi Dan Pengakuan Identitas Kultural Masyarakat Adat Di Indonesia.’ Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS) 3.1 (2025): 53-70.” *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)* 3, no. 1 (2025): 53–70.

Merdiani, Wentri, and Elli Ruslina. “Peran Hukum Dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Ekonomi Berbasis Keadilan: Role of Law in Enhancing Welfare through a Justice-Based Economy.’ Res Nullius Law Journal 7.1 (2025): 63-72.” *Res Nullius Law Journal* 7, no. 1 (2025): 63–72.

MOKODOMPIT, LIM. “DINAMIKA INDUSTRIALISASI: TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT ADAT PAPUA (STUDI KASUS: SUKU KAMORO MIMIKA, PROVINSI PAPUA)= Industrialization Dynamics: Leadership Transformation In Papua Indigenous Society (Case Study: Kamoro Mimika Tribe, Papua Pr.” Universitas Hasanuddin, 2024.

Nahumury, Amanda Putri. “PEMAKNAAN PEREMPUAN PAPUA TERHADAP IDENTITAS BUDAYA YANG DITAMPILKAN DALAM FILM DOKUMENTER” NOKEN RAHIM KEDUA”. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.

Ningsih, Luh Sulasti, I Ketut Putu Suardana, and Rieka Yulita Widawara. “REPRESENTASI KRITIK TERHADAP KEKUASAAN DAN PERLAWANAN DIGITAL DALAM VIDIO TIKTOK “INDONESIA GELAP”.’ Jurnal Ilmu

Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi 10.4 (2025): 783-803.” *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 10, no. 4 (2025): 783–803.

Novianto, Arif. “Berebut Saminisme: Artikulasi Politik Masyarakat Adat Dalam Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Pegunungan Kendeng.’ Kebijakan Publik Dalam Pusaran Perubahan Ideologi Dari Kuasa Negara Ke Dominasi Pasar (2018): 228â.” *Kebijakan Publik Dalam Pusaran Perubahan Ideologi Dari Kuasa Negara Ke Dominasi Pasar*, 2018, 228â.

Nurzaman, Mohamad Soleh. *Ekonomi Mikro Islam*. Penerbit Salemba, 2022. Penerbit Salemba, 2022.

Permana, Rangga Saptya Mohamad, Elis Suryani Nani Sumarlina, and Undang Ahmad Darsa. “Kritik Sosial Dalam Film-Film Kabayan Di Era Orde Baru: Ketimpangan Desa-Kota, Perilaku Materialistis Dan Dampak Globalisasi.’ KABUYUTAN 4.1 (2025): 68-78.” *KABUYUTAN* 4, no. 1 (2025): 68–78.

PRABAWA, I NYOMAN AGUS. “REKONSTRUKSI PENGATURAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI DI BALI BERBASIS KEADILAN. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Rozi, Syafuan, Firman Noor, Irine Hiraswari Gayatri, and Mochtar Pabottingi. *Politik Identitas: Problematika Dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali Dan Papua*. Bumi Aksara, 2021. Bumi Aksara, 2021.

Sabatini, Gabriella Hemas, Fajar Junaedi, S Sos, Rinasari Kusuma, and M I Kom. “Representasi Stereotype Terhadap Suku Papua Korowai (Analisis Semiotika Tentang Representasi Stereotype Terhadap Suku Papua Korowai Dalam Film Lost In Papua). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Sholichah, Hidayatus, Adam Hafidz Al Fajar, Syamraeni Syamraeni, and Mudfainna Mudfainna. “Systematic Literature Review: Pemberdayaan Masyarakat Inklusif Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial.’ *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 11.1 (2025): 27-40.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 11, no. 1 (2025): 27–40.

Sokoy, Fredrik, S Sos, M Sos, Rif'iy Qomarrullah, M Or, and Siane Maria Tampi. *Antropologi Ekonomi Dan Pembangunan Papua Dalam Bayang-Bayang Provinsi Olahraga*. Penerbit: Kramantara JS, 2025. Penerbit: Kramantara JS, 2025.

Sulaiman, Heri, Ramzi Durin, and Desi Purnama. "Hak Atas Mendapatkan Kehidupan Yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima: Hak Atas Mendapatkan Kehidupan Yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima.' *Dame Journal of Law* 1.1 (2025): 25-44." *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025): 25-44.

Sulaiman, Heri, Lusi Marwati, Salman Alfarezi, Tri Sulistiowati, and Aris Machmud. "John Rawls" Theory of Justice and Its Relevance in the Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary Era: Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer." *Al Hairy | Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 25-36.

Sulastry, Indah. "Perempuan Pembela Ham Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Kritis Pasal 27 Ayat (3) Junto Pasal 45 Uu It. Diss. UNUSIA, 2022." UNUSIA, 2022.

Syaiful Bahari, S H. *Hak Menguasai Negara Dalam Politik Hukum Agraria Di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025.

Tyaningrum, Annisa Mayang, Sudarsono Sudarsono, and Shinta Hadiyantina. "Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Konflik Agraria Dan Keadilan Sosial.' *Bacarita Law Journal* 5.2 (2025): 251-263." *Bacarita Law Journal* 5, no. 2 (2025): 251-63.